

Konstruktivisme Hubungan Internasional: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antarparadigma

Cecep Zakarias El Bilad¹

Abstract

The 1990s is the era of constructivism. It came into being in International Relations as a critique as well as correction to the two competing prevailing paradigms, rationalism-positivism and reflectivism-postpositivism. In so doing, it embraces some moderat aspects of the two. Epistemologically, despite its uniqueness constructivism has many similarities to the postpositivist camp that in this context they stand in the same line of anti-positivism. Ontologically, the paradigm offers the basic assumption that international structure is socially constructed. It is created through intersubjective practices between actors, and as a result emerges a relationship of influencing each other between the structure and its creators. Based on this, IR constructivist thinkers at the very decade started designing substantive theories as the alternative to rationalist-positivists' theoretical products. This article tries to comprehensively draw both constructivist ontological and epistemological assumptions in order to understand their middle-ground vision.

Keywords : ideas, material, object, phenomena, debates, structure, interpretation

Abstraksi

Era 1990an adalah era konstruktivisme Hubungan Internasional (HI). Paradigma ini lahir sebagai pembaharuan atas paradigma-paradigma lama dalam disiplin tersebut. Yang dilakukan paradigma tersebut adalah merangkul aspek-aspek moderat dua paradigma sebelumnya yang berseteru, rasionalis-positivis dan reflektivis-pospositivis. Secara epistemologis, konstruktivisme memiliki banyak persamaan dengan pospositivis sehingga dalam konteks ini konstruktivisme berada dalam satu barisan anti-positivisme. Sedangkan secara ontologis, paradigma ini menawarkan gagasan dasar bahwa struktur internasional adalah sebuah konstruksi sosial. Ia terbangun oleh praktek intersubjektif antaraktor yang kemudian terjadi hubungan saling mempengaruhi antara struktur dan aktor-aktor penciptanya. Dari asumsi tersebut para pemikir konstruktivis HI pada dekade tersebut mulai merumuskan teori-teori substantif sebagai tawaran alternatif terhadap produk-produk teoretis kaum rasionalis-positivis seperti neorealis dan neoliberal institusional. Artikel ini ingin coba menguraikan asumsi-asumsi ontologis dan epistemologis konstruktivisme secara komprehensif untuk memahami maksud dari cita-cita jalan tengahnya.

Keywords: Ide, material, objek, fenomena, perdebatan, struktur, kebenaran, interpretasi.

¹ Alumni Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

Pendahuluan

Di era 1980-an, Hubungan Internasional (HI) memasuki sebuah fase baru perdebatan akademik yang dikenal dengan '*third debate*.'² Debat terjadi seputar aspek-aspek metateoretis (epistemologi dan ontologi).³ Fase tersebut memunculkan dua kutub berseteru. Pertama adalah kutub mainstream '*rasionalis-positivis*', yakni realisme, liberalisme, Marxisme dan semua '*karib-kerabatnya*'. Rivalnya adalah kubu '*reflektivis-pospositivis*', yakni para ilmuwan pengusung ide-ide posmodern, posrukturalis, Mazhab Frankrut (teori kritis), feminis, poskolonial, teori normatif, studi perdamaian, pendekatan antropologis dan sosiologi historis.⁴ Kelompok ini lahir untuk menyerang fondasi-fondasi filosofis kelompok pertama, karena dengan begitu bangunan-bangunan teoretis yang terbangun di atasnya pun akan runtuh dengan sendirinya.

Memasuki akhir tahun 80-an, muncul pergeseran baru dengan lahirnya konstruktivisme yang mengklaim sebagai penengah dua kubu radikal itu. Konstruktivisme lahir dari rahim kamp reflektivis-pospositivis dan tetap mengusung semangat anti-positivisme,⁵ namun ia memiliki orientasi pada produksi dan reproduksi *sciences* '*ilmu pengetahuan*' sebagai *problem-solving* bagi persoalan-persoalan kemanusiaan— tugas yang dianggap telah disepelekan oleh para dekonstruktif di kamp reflektivis-pospositivis. Namun ilmu pengetahuan yang dimaksud konstruktivis berbeda dengan konsepsi kaum rasionalis-positivis. Konstruktivis tidak pernah berhasrat membuat klaim hegemonik tentang suatu kebenaran/pengetahuan, atau menetapkan standarisasi jalan menuju kebenaran tersebut.⁶ Jadilah konstruktivisme sebagai kubu ketiga perdebatan HI yang diperhitungkan.

Dalam tulisan ini penulis pertama-tama akan mengambil *ideas* (Ide⁷) sebagai sampel tema yang diperdebatkan oleh ketiga kubu pemikiran itu. Langkah ini dimaksudkan untuk memetakan secara instan di mana posisi ontologis konstruktivisme. Bagian selanjutnya adalah menyambung diskusi pada bagian pertama hingga memperoleh gambaran komprehensif tentang tawaran-tawaran ontologis konstruktivisme. Setelah itu, penulis akan mengupas secara mendalam pandangan-pandangan epistemologis konstruktivisme. Di bagian ini penulis hendak mempertegas garis demarkasi antara konstruktivisme dengan dua rivalnya. Akhirnya di bagian akhir disimpulkan bahwa konstruktivisme ialah inovasi mutakhir dalam HI. Namun konsekuensi dari keyakinan-keyakinan konstruktivis sendiri adalah bahwa konstruktivisme bukan puncak perkembangan disiplin tersebut. Selama perdebatan terus berlangsung, selama itu pula kemungkinan munculnya paradigma pasca-konstruktivisme tetap ada.

² Istilah '*third debate*' di sini mengikuti definisi dalam Yosef Lapid 1989, 235-54

³ Wæver 1996, 156-157

⁴ Smith 2000, 380

⁵ Hopf 1998, 181

⁶ Price and Reus-Smit 1998, 259-94.

⁷ Selanjutnya kami menulis Ide dengan huruf 'I' bukan 'i' ketika di tengah kalimat, dengan tujuan untuk membedakan kata 'ide' dalam artian umum bahasa Indonesia dengan 'ide' di sini dalam arti '*ideas*'.

Berdebat tentang 'Ide'

Lahirnya tiga aliran pemikiran tersebut pada dasarnya adalah dari kesepakatan dan ketidaksepakatan di antara ilmuwan HI tentang beberapa tema kajian. Satu dari beberapa tema sentral yang diperdebatkan adalah *ideas* (Ide): seberapa pentingkah eksistensi Ide dalam dunia internasional? Bagaimana hubungannya dengan realitas lain yang ada di dunia ini? Apakah dia sejati atau tidak? Konsep Ide ini muncul/dimunculkan sebagai tandingan atas konsep realitas material (*material reality*) yang telah lebih dahulu mewarnai langgam keilmuan HI. Dengan demikian, tema ini bisa dijadikan sebagai jalan pintas untuk memasuki arena perdebatan tiga aliran tersebut, untuk kemudian memasuki 'rumah' konstruktivisme.

Menurut Steve Woolgar, perdebatan ontologis dan epistemologis tentang Ide dalam ilmu sosial menghasilkan tiga macam pendekatan: *the reflective*, *the constitutive*, dan *the mediative*.⁸ Pendekatan pertama melihat realitas (material) dan Ide sebagai dua hal yang berbeda dan terpisah sama sekali. Realitas adalah segala sesuatu yang dapat diindra. Ada juga memang realitas yang tidak kasat mata, namun eksistensinya tetap bisa dirasakan, ditemukan dan dideskripsikan. Oleh karenanya, realitas itu independen dari subjektivitas manusia. Sedangkan Ide berada di dalam pikiran. Ia tidak membentuk realitas sosial, tetapi hanya sebentar refleksi dunia material dan pembenaran atas sebab-sebab material. Meskipun memiliki pengaruh, seperti menurut Robert Keohane, pengaruh tersebut sifatnya minimalis, hanya sebagai *intervening variable*. Signifikansinya Ide tetap ditentukan oleh struktur sosial seperti persebaran kekuatan ekonomi, militer, teknologi, kekayaan alam, dan lain sebagainya.⁹ Pendekatan ini dianut oleh kelompok mainstream seperti neorealis dan neoliberal institusional.

Sebaliknya perspektif kedua *the constitutive* meyakini bahwa realitas tiada lain adalah Ide, kumpulan relasional Ide. Apa yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat diindra, bisa dibuktikan ilmiah, sejatinya adalah hasil fantasi. Apa yang selama ini dinamakan negara, perang, senjata nuklir, sistem internasional, dan lain-lain yang kasat maupun tidak kasat mata, semuanya adalah efek dari ide/diskursus. Dalam bahasa Alexander Wendt, paham ini meyakini bahwa kehidupan sosial/internasional adalah "*ideas all the way down*."¹⁰ Pendekatan ini dianut oleh para poststrukturalis-posmodernis. Maka dari itu, poros kajian mereka adalah seputar ide/diskursus: bagaimana diskursus diproduksi dan direproduksi; bagaimana diskursus menciptakan fenomena internasional; bagaimana hubungannya dengan kekuasaan; dan lain sebagainya. Muncullah kemudian *third debate* saat pendekatan ini dibawa ke ranah HI.

Pendekatan *the mediative* mengambil posisi moderat, menengahi ekstrimitas dua pendekatan sebelumnya. Inilah posisi yang dianut oleh para konstruktivis HI. Pendekatan ini mengakui eksistensi realitas material. Namun berbeda dengan pendekatan pertama yang menganggap realitas material itu sebagai netral, objektif dan terberi (*given*), pendekatan ini memandang realitas material selalu merupakan produk sosial. Eksistensinya tidak berarti sebelum

⁸ Adler 1997, 323-324.

⁹ Ibid., 331

¹⁰ Wendt 1999, 90

disematkan makna tertentu.¹¹ Contohnya, seperti dikutip dari Guzzini,¹² adalah uang. Secara fisik, uang adalah selembar kertas atau sekeping logam dengan ukuran, bentuk dan motif tertentu. Namun fakta material tersebut hanya dapat menjadi 'uang' setelah diberikan pemaknaan bahwa benda tersebut adalah alat untuk jual beli dan dinamakan 'uang'. Ketika orang-orang berhenti bersepakat tentang fungsi asli benda tersebut, maka ia bukan lagi uang, meskipun secara fisik ia tetap seperti sedia kala. Jadi, kebenaran tentang sebuah fakta muncul dari makna yang disepakati secara intersubjektif (*an intersubjectively shared set of meanings*),¹³ dan makna tidak lain adalah Ide.

Jadi, konstruktivis mengakui eksistensi keduanya, fakta material dan ideasional. Kalau kelompok pertama meyakini fakta material sebagai yang utama dan Ide hanya sebagai refleksi dari dunia sosial, konstruktivis meyakini bahwa keduanya memiliki kedudukan ontologis yang setara. Realitas material tidak berarti apa-apa tanpa Ide (pemaknaan). Ide hanya akan sebatas 'ide' jika tidak direpresentasikan dalam bentuk huruf atau sistem simbol lainnya, atau jika tidak diwujudkan secara fisik. Ide tentang sesuatu yang dapat digunakan untuk tukar-menukar barang hanya dapat berarti setelah manusia mendesain unsur material tertentu sebagai perwujudan ide tersebut, yang kemudian penamaannya disimbolkan dengan kata 'uang', dan hal tersebut kemudian diamini oleh orang lain.

Dikotomi Ide-materi ini memberikan pengaruh besar saat dimasukkan dalam bejana keilmuan HI pada era *third debate*. Dikotomi ini merubah tema besar bidang studi tersebut dari 'bagaimana menciptakan perdamaian dunia' menjadi 'atas dasar apa negara bertindak, faktor material atau Ide'. Faktor material dapat berupa kepentingan nasional, baik ekonomi maupun keamanan, atau struktur internasional—yang diartikan sebagai distribusi power/ kapabilitas material. Sementara faktor ideasional berupa identitas, norma, diskursus, sejarah, moral, agama, dan lain-lain. Kendati demikian, dikotomi Ide-materi ini akhirnya tetap mengarah pada isu utama HI tentang perang dan damai. Sebab, mengetahui faktor apa yang mendasari negara-negara bertindak berarti mengetahui mengapa dan bagaimana mereka bisa berperang dan berdamai.¹⁴

Janji Konstruktivisme

Sebagai produk terbaru perdebatan kontemporer HI, konstruktivisme berambisi mengevaluasi hasil-hasil pergulatan akademik rasionalis-positivis dan reflektivis-pospositivis. Perdebatan dua kubu tersebut memang sepertinya tidak akan pernah menemukan titik temu. Jalan tengah konstruktivis dibangun mula-mula dari auto-kritik terhadap keduanya, kemudian dari situ ia menawarkan gagasan-gagasan khasnya. Berikut adalah uraian asumsi-asumsi dasar yang menjadi ciri khas kaum konstruktivis:

¹¹ Wendt 1995, 73-74

¹² Guzzini 2000, 160

¹³ Ibid.

¹⁴ Tentang pergulatan antara Ide dan materi memperebutkan supremasi dalam penjelasan perang-damai dalam sejarah dunia, lihat Desh, 1998

Wilayah Ontologi

Pertama-tama, konstruktivisme meyakini signifikansi struktur ideasonal dalam sistem internasional. Struktur Ideasonal dan material saling bergulat membentuk sistem. Bahkan sebagian konstruktivis cenderung ingin menunjukkan superioritas Ide dari materi. Jika rasionalis-positivis mendoktrinkan bahwa struktur internasional tidak lain merupakan distribusi kapabilitas material, konstruktivis meyakini sebaliknya bahwa struktur internasional adalah distribusi Ide, dan negara-negara bertindak mengikuti pola persebaran Ide. Pola persebaran kapabilitas material pun dimaknakan sesuai dengan pola persebaran Ide tersebut.¹⁵ Kehadiran armada militer AS di kawasan Teluk sejak 1990, misalnya, memberikan makna berbeda bagi masing-masing negara di kawasan tersebut. Bagi Arab Saudi dan negara-negara Arab Teluk kaya minyak, kehadiran kekuatan AS menjadi anugerah. Mereka memanfaatkannya sebagai tameng dari ancaman musuh. Pengiriman armada militer itu sendiri ditujukan AS untuk mengakhiri agresi militer Irak atas Kuwait. Di pihak lain, Iran mempersepsikan kehadiran kekuatan AS itu sebagai ancaman serius bagi keamanan nasionalnya. Padahal saat itu Iran pun baru saja menyelesaikan perang delapan tahunnya dengan Irak.¹⁶ Mengapa perbedaan respon tersebut bisa terjadi? Jika mengacu pada pandangan konstruktivis Alexander Wendt, jawabannya adalah karena ada perbedaan Ide tentang AS dalam benak Iran dan negara-negara Teluk lainnya: Ide bahwa AS adalah sahabat tersebar di kalangan negara-negara Arab kaya minyak, sementara bahwa AS adalah musuh besar tertanam di benak Iran.¹⁷

Selanjutnya, pandangan ontologis konstruktivis juga membawa misi mengangkat drajat subjek/agen dari keterpurukannya selama ini akibat hegemoni struktur. Dalam dunia kaum rasionalis-positivis, subjek tidak memiliki otonomi, karena semua perbuatannya tidak lain merupakan respon terhadap struktur/lingkungannya. Dalam perspektif neorealis, misalnya, struktur internasional adalah anarki dan oleh sebab itu setiap negara harus mengorientasikan gerak-geriknya pada pencapaian kepentingan nasionalnya.¹⁸ Sementara itu dalam perspektif posmodern, struktur internasional didefinisikan sebagai distribusi diskursus di semua lininya.¹⁹ Struktur internasional yang secara fisik terdiri atas subjek orang, negara, organisasi internasional dan korporasi, bergerak/digerakkan oleh pola persebaran diskursus. Posmodern memang mengakui bahwa diskursus diproduksi, direproduksi, didistribusikan dan diredistribusikan oleh subjek, namun mereka juga meyakini bahwa diskursus individual itu sendiri dibentuk oleh diskursus-diskursus yang mengitarinya.²⁰ Dengan kata lain, jika dalam dunia neorealis-neoliberalis subjek terjat dalam jejaring anarki sistem internasional, dalam dunia posstrukturalis-posmodernis terjat dalam jejaring Ide/diskursus, atau barangkali wujudnya yang unik dan beragam pun dianggap sebagai efek dari diskursus.

¹⁵ Wendt 1995, 73; Price&Reus-Smit, 266

¹⁶ Marschall 2003, 108

¹⁷ Bilad 2011, 117-123;129

¹⁸ Waltz 1979, 102-103

¹⁹ "international life is ideas all the way down." Wendt 1999, 90

²⁰ Adler, 333; Ashley 1989, 259-322.

Berbeda dari keduanya, konstruktivis mengakui eksistensi dan peran konstitutif agen dan struktur baik material maupun ideasonal. Elemen-elemen ini berkelindan membentuk dan 'menghidupkan' struktur internasional. Gagasan khas konstruktivis ini berporos pada konsep 'praktek (*practice*)/interaksi'. Struktur sosial/internasional tidak lain adalah proses sekaligus hasil praktek sosial yang di dalamnya tidak hanya mempertemukan fisik antaragen, tetapi juga mempertemukan, mempertukarkan, mempersamakan dan mendifusikan subjektivitas-subjektivitasnya (*intersubjective processes/discursive practices*).²¹

Posisi praktek sangat sentral di sini. Hanya dengan praktek-lah struktur terbentuk dan eksis.²² Sekumpulan orang atau negara saja tanpa ada ineraksi baik melalui gerak, kata-kata atau simbol-simbol komunikasi lainnya, tidak akan membentuk apa-apa kecuali sekumpulan manusia saja. Tetapi ketika komunikasi interaktif di antara orang-orang itu dimulai, barulah terbentuk pola atau struktur hubungan sosial. Di sinilah terlihat misi bahwa konstruktivisme mengangkat derajat subjek dari hegemoni struktur. Tanpa subjek-subjek yang berinteraksi struktur tidak akan pernah ada. Maka sejatinya subjeklah yang berkuasa atas struktur, bukan sebaliknya. Subjeklah yang menentukan bagaimana bentuk, warna dan nuansa struktur tersebut. Subjek juga memiliki kemampuan untuk mentransformasikan struktur yang telah terbentuk ke dalam bentuk, warna atau nuansa lain yang lebih menguntungkan bagi subjek melalui proses intersubjektif.

Namun kemudian, setelah tercipta struktur berbalik mempengaruhi subjek-subjek penciptanya. Struktur menjelma menjadi semacam aturan main (*norms*) bagi subjek-subjek itu dalam melangsungkan interaksinya. Atau dengan kata lain, proses interaksi menanamkan pengetahuan (*knowledge*) atau kesadaran dalam benak masing-masing subjek tentang diri sendiri (*Self*), orang lain (*Others*), kebutuhan, kepentingan, identitas dan posisi sosialnya. Pengetahuan tersebut kemudian menjadi landasan dan panduan normatif bagi masing-masing untuk menjalankan aktivitas sosialnya. Demikianlah hubungan saling mempengaruhi agen-struktur berlangsung: dalam sebuah lingkaran interaksi, subjek menciptakan dan mempengaruhi struktur, dan struktur mempengaruhi subjek. Seperti diungkapkan Nicholas G. Onuf bahwa, "*People make rules, rules make society, society's rules make people conduct themselves in specified ways.*"²³

Saat interaksi berlangsung terjadi pertemuan dan pertukaran ide antarindividu yang terlibat sehingga terbentuk pemahaman bersama (*shared understanding*) tentang *Self*, *Others*, dan struktur. Namun kemudian muncul persoalan-persoalan seperti: mengapa satu ide/subjektivitas bisa menjadi norma sementara yang lain tidak? Ketika yang tercipta adalah struktur sosial yang hierarkis, mengapa dan bagaimana satu subjek bisa menduduki posisi dominan atas lainnya? Bagaimana struktur yang hierarkis tersebut bisa tercipta? Secara praktis pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menjadi, misalnya: mengapa subjektivitas Amerika Serikat tentang '*war against terrorism*' dalam waktu singkat menjadi norma global sehingga membuat negara-negara Muslim seperti Indonesia bergegas mengklaim diri sebagai negara Muslim moderat agar tidak digolongkan bersama

²¹ Price and Reus-Smit, 267; Adler, 333

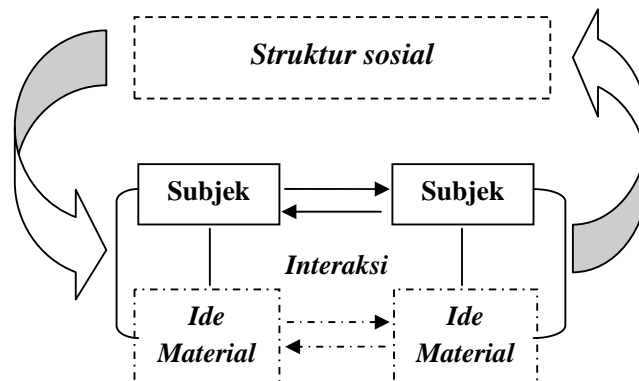
²² Wendt 1995, 74

²³ Onuf 1989, 66

mereka yang dianggap radikal/teroris? Mengapa dan bagaimana konsep politik demokrasi, bukan teokrasi atau yang lainnya, bisa dianggap sebagai yang terbaik secara global sehingga hampir setiap negara kini berlomba-lomba ingin disebut demokratis? Mengapa dan bagaimana gagasan yang membagi negara-negara ke dalam dunia pertama, kedua dan ketiga, bisa mendunia dan pola interaksi antarnegara berlangsung nampak menyesuaikan dengan doktrin tersebut?

Dalam persoalan-persoalan inilah pengakuan konstruktivis akan signifikansi sumber-sumber material seperti power militer, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan dan kepentingan nasional menemukan momentumnya. Kendati sumber-sumber material ini dan struktur persebarannya hanya bisa bermakna dalam struktur ideasonal, seperti telah disinggung, struktur ideasonal sendiri hanya bisa bekerja dengan baik jika ditopang oleh sumber-sumber material.²⁴ Agen yang unggul dalam kepemilikan power akan memiliki *privilege* untuk bisa mendikte atau memaksakan subjektivitasnya terhadap agen-agen lain.²⁵ Subjektivitas agen superior inilah yang berpeluang besar untuk bisa diakui sebagai norma internasional (struktur ideasonal), seperti *war against terrorism*, demokrasi dan doktrin tentang tiga dunia di atas. Subjektivitas-subjektivitas ini berhasil menjadi norma global karena diciptakan dan disebarkan oleh negara-negara superior di Eropa dan Amerika Utara. Akan lain ceritanya jika itu semua berasal dari aktor-aktor inferior di belahan bumi lain.

Berikut adalah penyederhanaan secara figuratif dari pandangan ontologis konstruktivis terhadap fenomena sosial:



Dengan meletakkan agen pada posisi sejajar dengan struktur—bahkan pada konteks bahwa agen adalah ‘pencipta’ struktur, posisi agen lebih tinggi dari pada struktur—konstruktivis ingin membuka kemungkinan-kemungkinan transformasi struktur oleh agen.²⁶ Di sinilah barangkali letak visi pembebasan konstruktivis. Jika dalam suatu struktur internasional terdapat kesenjangan atau ketidakadilan, misalnya, dan perlu dilakukan transformasi struktural untuk menciptakan keadilan, maka ini bisa dilakukan dengan menggali pemahaman terlebih dahulu terhadap struktur tersebut oleh subjek-subjek terkait untuk menemukan celah dan jalan dimulainya transformasi yang dikehendaki.

²⁴ Ibid, 64

²⁵ Ibid; Wendt 1999, 331

²⁶ Guzzini and Leander 2006, 8

Perlu juga di sini disinggung bahwa, terkait struktur ideasonal, dalam konstruktivisme terdapat beragam sisi penglihatan. Ada yang memfokuskan kajiannya pada persoalan identitas, seperti Alexander Wendt (1992, 1995, 1999); ada yang mengkajinya sebagai *rule/rules* dan *speech act* seperti Nicholas Onuf (1989); ada pula yang menganalisis produksi, reproduksi dan pengaruh norma (*norms*) di tingkat internasional seperti Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998); sementara John Gerard Guggie (1986, 1993) lebih suka mempelajari proses perubahan sistem internasional; kedaulatan dikaji oleh Cynthia Weber (1995); Peter Katzenstein melakukan kajian atas identitas, norma dan sejarah (1996, 1997, 2003, 2008); Jim George melakukan studi tentang bahasa, makna dan *knowledge* (1994); dan masih banyak lagi. Tema-tema tersebut telah lama disisihkan oleh ilmuwan-ilmuan HI mainstream baik neorealis, neoliberal institusionalis maupun Marxis struktural, dan kini mendapat tempat istimewa di mata para konstruktivis.

Wilayah Epistemologi

Setelah mengetahui apa saja isi dunia sosial dan bagaimana unsur-unsur di dalamnya bekerja (ontologi), kini saatnya mendiskusikan bagaimana dunia tersebut dikaji (epistemologi). Pada dasarnya, konstruktivis memiliki prinsip-prinsip epistemologis yang mirip dengan kubu reflektivis-pospositivis. Terminologi 'reflektivis' dan 'pospositivis' sendiri yang dipilih penulis untuk menyebut para pengkritik mainstream HI, adalah terkait isu-isu epistemologis. Julukan 'reflektivis' pertama kali diberikan oleh Robert Keohane, tokoh neoliberal institusional, pada 1988 kepada sekelompok ilmuwan seperti Hayward Alker, Richard Ashley, Friedrich Kratochwil dan John Ruggie yang berupa menampilkan HI secara reflektif. Disebut 'reflektivis' karena mereka menekankan peran unsur-unsur impersonal dan kultural seperti identitas, norma dan diskursus— yang semuanya ini oleh Keohane dianggap tidak objektif dan irasional—dalam konstelasi kehidupan internasional. Dan oleh karenanya tekstualitas dan historisitas menjadi desain utama proyek akademik mereka.²⁷ Sementara 'pospositivis' adalah term untuk menyebut para ilmuwan sosial yang anti-positivisme, yang menolak semua doktrin filosofis tentang standar penelitian ilmiah positivis untuk dunia sosial.

Positivisme

Teoritikus semisal Keohane adalah penganut positivisme, faham filsafat ilmu yang menjadi kerangka dasar ilmu-ilmu modern baik alam maupun sosial. Asumsi dasar faham ini adalah bahwa realitas atau objek-objek fisik itu eksis dan independen dari representasi subjek (manusia) baik berupa kerangka konseptual, kategorisasi, nilai maupun bahasa. Ia hadir dengan sendirinya dan demikian dari semula dan untuk selamanya. Ilmu pengetahuan menjadi semacam cermin yang merefleksikan objek-objek independen tersebut, dan oleh karenanya ia bersifat objektif. Ia menjadi satu-satunya perangkat normatif yang layak dijadikan standar kehidupan manusia.²⁸

Dari situ positivisme kemudian menyusun standarisasi pengetahuan untuk bisa dikatakan valid dan objektif. Menurut Steve Smith, paling tidak ada empat

²⁷ Rengger 2000, 13-14

²⁸ Adian 2002

prinsip positivisme yang diadopsi dalam HI sebagai standar ilmiah yang harus dipatuhi:²⁹

- *Pertama*, kesatuan ilmu pengetahuan (*the unity of science*). Prinsip ini menyatakan bahwa dunia sosial dan dunia alamiah pada hakekatnya adalah sama, sehingga perangkat-perangkat penelitiannya perlu disamakan. 'Kesuksesan' perangkat penelitian eksakta dalam menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena alam akan terulang pada analisis fenomena-fenomena sosial termasuk di tingkat internasional. Bahkan menurut J. David Singer, Melvin Small dan rekan-rekannya, kelambanan perkembangan disiplin HI sehingga tidak mampu membaca dan memprediksi objek materinya (fenomena internasional) disebabkan karena disiplin tersebut tidak mencontoh pola perkembangan ilmu-ilmu alam yang terbukti dinamis dan efektif.³⁰ Oleh karena itu, adopsi metodologi dan metode saintifik menjadi alternatif satu-satunya untuk memajukan disiplin tersebut.
- *Kedua*, bebas nilai. Dalam proses penggalian pengetahuan, subjek/peneliti harus benar-benar menjaga jarak dengan objek yang diteliti, baik secara fisik maupun ideasonal. Fakta eksis secara independen sehingga harus direpresentasikan sebagaimana yang ditampakkannya. Subjek harus netral. Dalam arti bahwa perasaan, emosi dan nilai-nilai anutannya seperti agama, ideologi, kultur dan lain sebagainya harus disumbat agar tidak merembes ke dalam bejana pengolahan data dari fakta-fakta di lapangan, demi menghasilkan pengetahuan yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan.
- *Ketiga*, naturalisme, yaitu keyakinan bahwa dalam dunia sosial terdapat regularitas sebagaimana dalam dunia alamiah. Artinya bahwa, fenomena-fenomena sosial di tingkat internasional yang terjadi saat ini seperti perang, kerjasama, aliansi, adalah pengulangan dari fenomena serupa di masa lampau, dan akan terjadi kembali di masa yang akan datang. Meski tidak sama persis, karena perbedaan ruang, waktu dan aktor, peristiwa-peristiwa tersebut muncul dengan kemiripan-kemiripan sebab dan akibat. Pengkajian mendalam terhadap objek-objek tersebut secara objektif akan menghasilkan rumusan-rumusan teoretis (*law-like generalizations*) yang *timeless-spaceless* dan berfaedah bagi umat manusia.
- *Keempat*, tumbuhnya keyakinan kuat dalam benak para ilmuan HI mainstream bahwa validasi empiris atau falsifikasi adalah jalan satu-satunya untuk meraih pengetahuan yang sejati. Setiap hipotesis atau teori harus berkorespondensi dengan fakta-fakta di lapangan yang dibuktikan dengan standar pengujian empiris. Jika tidak, maka hipotesis atau teori tersebut dianggap tidak ilmiah alias mitos.

Keempat prinsip inilah, sekali lagi, yang membentuk kerangka pikir ilmuan-ilmuan HI sejak 1960an (era *second debate*). Doktrin-doktrin tersebut pada akhirnya menjadikan HI ilmu yang kering dari nafas kemanusiaan. Doktrin-doktrin tersebut hanya mempertimbangkan secara deterministik segala sesuatu yang material dan

²⁹ Smith 1996, 15-16

³⁰ Chernoff 2007, 89-91

kasat mata. Bahkan memasuki akhir 1970an kajian HI semakin terfokus pada pergulatan struktur internasional, institusi internasional, negara dan kelompok negara. Konsekuensi dari pergeseran tersebut adalah mengerdilnya derajat kemanusiaan, dan sebaliknya semakin menanjaknya determinasi hegemonik subjek-subjek imajinatif itu atas manusia.

Entah disadari atau tidak, atas nama negara, kepentingan nasional, keamanan, ekonomi, atau bahkan perdamaian dunia, para ilmuwan HI itu menjadikan manusia, dimana mereka termasuk di dalamnya, dan bahkan entitas-entitas fisik lain di muka bumi ini, tidak lebih berharga dari mahluk-mahluk imajiner itu. Sebagai contoh, untuk memperkuat tesisnya bahwa bipolaritas dalam sistem internasional lebih menjamin perdamaian dunia dari pada multipolaritas, John J. Mearsheimer mengajukan data sebagai berikut: sistem multipolar pada 45 tahun pertama abad ke-20, dimana terjadi ketimpangan kekuatan di antara negara-negara besar di Eropa yang berujung pada pecahnya dua Perang Dunia, telah menyebabkan 50 juta kematian rakyat Eropa; sementara sistem bipolar sepanjang Perang Dingin yang memposisikan AS dan Uni Soviet sebagai dua adikuasa yang saling mengimbangi, menyisakan tidak lebih dari 15.000 kematian dalam dua perang, Rusia-Hungaria pada 1956 dan perang di Siprus.³¹ Setelah membandingkan angka kematian tersebut, tokoh behavioralis itu kemudian menyimpulkan bahwa era Perang Dingin adalah era perdamaian terpanjang (*the longest period of peace*) dalam sejarah Eropa.³²

Ajaran positivis tentang objektivitas dan validasi empiris yang dianut Mearsheimer menyebabkan angka-angka kematian tersebut tidak lebih dari sekedar fakta historis yang perlu ditampilkan secara numerik sebagai argumentasi ilmiah atas dukungannya terhadap sistem bipolaritas. Sementara doktrin bebas nilai dan naturalisme memberikannya kepercayaan diri untuk menuliskan angka-angka tersebut dan membuat ramalan tentang Eropa yang kacau pasca Perang Dingin—ramalan yang terbukti keliru. Lagi pula, tepatkah angka 15.000 untuk menjumlahkan korban nyawa selama Perang Dingin? Angka tersebut jelas menegaskan fakta bahwa bipolaritas Perang Dingin berandil besar dalam pecahnya konflik-konflik berdarah di Timur Tengah, Asia Timur dan Asia Tenggara baik di tingkat domestik maupun regional. Bukankah peristiwa-peristiwa berdarah di tanah air pada zaman PKI juga terkait erat dengan konteks bipolaritas? Jika multipolaritas Eropa telah menyebabkan kolonialisme di hampir seluruh penjuru dunia, maka bipolaritas berbarengan (menyebabkan?) neokolonialisme di wilayah-wilayah periperal serta mendorong perang-perang besar seperti di Vietnam, Korut-Korsel dan Afghanistan. Jika dijumlahkan dengan jumlah korban di wilayah-wilayah itu, tentu angka kematian akibat PD akan menjadi berlipat-lipat. Pada kenyataannya bagi masyarakat di belahan-belahan bumi itu, bipolaritas tidak lebih baik dari multipolaritas, dan Mearsheimer tidak menghiraukannya.

Jelas sekali, pengungkapan fakta dengan cara demikian nampak sangat naif, diskriminatif dan tidak manusiawi. Jika fakta-fakta kematian itu memang diungkapkan untuk meyakinkan dunia tentang janji perdamaian bipolaritas, perdamaian untuk siapa, Amerika Serikat, Eropa, Asia atau Afrika? Yang jelas bukan

³¹ Mearsheimer 1999, 10

³² Ibid

untuk semua. Bipolaritas tidak membuat orang-orang di Korut, Korsel, Vietnam, Iran, Irak, Palestina, dan tempat-tempat lain pada waktu itu merasa damai.

Seolah-olah bagi pemikir neorealis itu perdamaian didefinisikan sebagai masa ketika dalam rentang waktu tertentu dan wilayah tertentu di muka bumi ini tidak ada kematian manusia yang melebihi angka 15.000 jiwa. Definisi ini barang kali akan tidak disetujui oleh banyak orang. Apalagi angka ini hanya hasil kalkulasi fisik dari jumlah mayat yang ditemukan. Padahal jika dilihat dari perspektif kemanusiaan, angka tersebut berarti akumulasi dari lima belas ribu rasa sakit, kengerian, kegetiran dan penderitaan akibat kematian; ada ribuan perempuan menjadi janda; puluhan ribu anak kehilangan masa depannya akibat ditinggal mati orangtuanya; ada ratusan ribu orang terluka dan cacat; ada puluhan ribu rumah hancur; dan seterusnya. Tapi bagi para pemikir HI behavioralis-positivistik, fakta-fakta tersebut adalah tidak berarti karena dianggap tidak objektif dan tidak bebas nilai. Deskripsi-deskripsi tentang rasa sakit, kengerian, kesengsaraan, penderitaan dianggap subjektif, bersumber dari perasaan, bukan rasionalitas, sehingga tidak boleh dihiraukan demi memperoleh hasil pengamatan dan penelitian yang 'objektif' dan 'empiris'.

Anti-positivisme Konstruktivis

Contoh di atas adalah satu dari sekian persoalan modernitas yang menginspirasi bangkitnya ilmuan-ilmuan kritis dari berbagai disiplin. Dari gerbongnya masing-masing seperti teori kritis, posmodernisme, postrukturalisme dan konstruktivisme sosial, mereka melancarkan misi bersama meruntuhkan pilar-pilar tradisi akademik modern sekaligus mendongkel fondasi-fondasinya. Dalam HI, misi tersebut dijalankan oleh ilmuan-ilmuan seperti Andrew Linklater, Richard Wyn Jones, Richard Ashley, R. B. J. Walker, James Der Derian, dan lain-lain.

Mereka sepakat bahwa di balik kesuksesannya, modernitas telah menyisakan segudang krisis kemanusiaan dan lingkungan: kelaparan, kemiskinan, perang, kerusakan hutan, pemanasan global, hingga terorisme. Modernitas adalah satu fase dari perkembangan peradaban manusia. Sebagai tren global, modernitas merupakan proyek perwujudan dari sebuah cara pandang dunia yang mengajarkan cita-cita, harapan dan ambisi hidup setiap individu penganutnya. Dan ilmu pengetahuan adalah jalan untuk mencapai semua cita-cita, harapan dan ambisi manusia modern. Ini artinya, krisis-krisis di era modern hanya akan bisa diselesaikan dengan merombak cara pandang dunia itu. Inilah yang dalam HI coba dilakukan oleh ilmuan-ilmuan seperti disebutkan di atas. Mereka coba membangun sebuah kerangka metatortoris baru dalam studi HI sebagai pijakan untuk memproduksi perangkat-perangkat analisis baru terhadap fenomena internasional. Dengan kata lain, mereka coba membangun cara pandang baru atas hubungan internasional.

Sejak itu HI terbelah ke dalam dua pendekatan besar yang oleh Fred Chernoff diistilahkan: "*outside*" dan "*inside*."³³ Pendekatan pertama (*outside approach*) mengusung prinsip kausalitas dan regularitas perilaku aktor-aktor internasional—prinsip yang diadopsi dari ilmu alam. Pendekatan ini menjadi warna

³³ Chernoff, 6

dominan HI dalam setengah abad terakhir ini dan berkembang pesat di Amerika Serikat. Sementara pendekatan kedua (*inside approach*) atau dikenal juga sebagai 'reflektivis' mengagendakan studi untuk memahami fenomena sosial sesuai dengan yang dipahami oleh aktor-aktor yang terlibat. Pendekatan ini mencoba untuk membaca alam pikiran para aktor tentang tindakan-tindakan dan lingkungan sosial mereka.

Namun kemudian, perlawanan pendekatan *inside* terhadap *outside* ini menciptakan ekstrimitas di antara dua belah pihak: *outside* kukuh dengan prinsip-prinsip positivistiknya yang hegemonik dan 'angkuh', sementara *inside* sangat militan dengan pluralisme kebenaran dan metodologi, emansipasi, serta antifondasionalismenya. Mereka mendekonstruksi fenomena sosial namun membiarkannya berserakan. Konstruktivisme lahir untuk menawarkan jalan ketiga dengan memadukan unsur-unsur moderat dari kedua kubu ekstrim itu. Demikian pembahasannya:

Konstruktivisme menolak doktrin *the unity of science*. Doktrin tersebut ditolak karena determinis-rasionalis-empiris. Determinis dalam arti, manusia dianggap sebagai objek yang pasif. Perubahan, transformasi, pergerakan dan tindakan objek pasif manusia merupakan bagian dari rangkaian kausalitas alam semesta. Itu semua dianggap sebagai respon terhadap sebab-sebab tertentu yang sifatnya empiris. Contohnya, saat lapar manusia akan makan; dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan makanan itu; dan akan memakan apapun selama makanan tersebut membuatnya kenyang dan aman untuk dikonsumsi. Aktifitas 'makan dan 'mencari makan' dilakukan karena ada sebab 'lapar', dan tindakan tersebut adalah rasional sebab manusia memang adalah makhluk yang rasional. Kondisi lapar adalah empiris karena dapat dirasakan, dan begitu juga dengan makanan itu sendiri yang pastinya adalah sesuatu yang dapat diindera. Apalagi proses terjadinya lapar dan makanan sebagai 'obat' lapar itu juga bisa dijelaskan secara ilmiah.

Bagi konstruktivisme, cara pandang semacam itu terlalu menyepelkan manusia sebagai makhluk kompleks, yang tidak hanya tersusun atas aspek-aspek fisik tetapi juga non-fisik seperti akal, hasrat dan batin. Dengan ketiganya manusia tidak hanya menciptakan kebutuhan-kebutuhan fisik, tetapi juga yang non-fisik yaitu nilai-nilai seperti norma, aturan, identitas, agama, ideologi, dan lain sebagainya. Urgensi kebutuhan-kebutuhan non-fisik ini juga tidak inferior dibandingkan dengan yang fisik seperti makan dan minum. Atas dasar inilah positivisme yang deterministik-rasionalis-empiris dianggap sangat tidak cocok dipakai untuk membaca fenomena manusia dan sosial. Jadi, lapar tidak selamanya mendorong manusia untuk makan. Seorang Muslim yang taat, misalnya, akan menahan rasa laparnya hingga waktu yang sudah ditentukan di malam hari selama bulan Ramadhan. Makanan yang akan dimakannya pun di waktu berbuka, atau kapan saja di luar Ramadhan, akan dicarinya dengan cara yang halal (tidak sembarang). Dia pun tidak akan memakan sembarang makanan seperti daging babi dan anjing sebab keduanya diharamkan oleh ajaran agamanya. Jelas sekali bahwa orang Muslim tersebut bertindak demikian bukan atas dasar kebutuhan fisik semata, tetapi lebih atas dasar kebutuhan batiniah akan relijiusitas. Dia juga tidak

bisa dituduh irasional, sebab dia memiliki rasionalitasnya sendiri untuk bertindak demikian.

Satu contoh ini sekedar untuk menunjukkan bahwa manusia dan dunia sosialnya tidak sesederhana objek-objek penelitian lain yang hanya merespon rangsangan-rangsangan fisik. Manusia mampu menentukan untuk mengambil jarak atau mengurangi respon terhadap rangsangan-rangsangan fisik, dan sebaliknya memberikan responnya secara lebih besar kepada rangsangan-rangsangan 'irasional' seperti agama.³⁴ Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh hewan, tumbuhan dan benda-benda lain, dan oleh karenanya manusia tidak bisa diteliti dengan cara-cara penelitian untuk benda-benda itu.

Hal serupa juga terjadi di tingkat internasional, karena hubungan internasional adalah puncak sosialitas manusia. Semua makhluk imajinatif yang diidentifikasi sebagai aktor internasional seperti negara dan organisasi internasional adalah representasi dari manusia dan 'dihidupkan' juga oleh manusia. Dunia internasional adalah dunia manusia, sehingga mengkajinya dengan perangkat riset yang serupa dengan perangkat untuk meneliti batu, air, tanah, pohon dan binatang, seperti yang dilakukan neorealis dan neoliberal adalah sebuah kekeliruan.

Konstruktivis menolak doktrin 'bebas nilai' (*the fact-value distinction*). Argumentasinya bersandar pada pemikiran Thomas Kuhn. Bagi konstruktivis, fakta (*brute facts*) sudah tidak bebas nilai bahkan sejak pertama kali diungkapkan/dibahasakan. Asumsinya adalah, bahwa setiap orang (ilmuan) memiliki cara pandang yang berbeda-beda tentang fenomena, dan perbedaan ini ditentukan oleh paradigma³⁵ yang dianut. Artinya, satu fenomena akan dimaknakan secara berbeda oleh dua ilmuan yang menganut paradigma berbeda, dan selanjutnya akan diteliti secara berbeda pula. Secara analogis dapat dicontohkan:³⁶ fenomena panti jompo akan dimaknakan secara kontras oleh orang Amerika dan Indonesia. Di Amerika orang-orang lanjut usia yang dipelihara negara dalam sebuah panti adalah lumrah dan manusiawi. Namun bagi umumnya masyarakat Indonesia, hal tersebut adalah tabu. Seorang anak yang 'mengusir' orang tuanya yang sudah lanjut usia ke panti jompo akan memperoleh hukuman moral dari masyarakat sekitarnya sebagai anak durhaka. Lalu siapa yang benar? Dalam hal ini tidak ada klaim benar-salah, karena dua kelompok masyarakat itu memiliki paradigma berbeda tentang hubungan familial yang dipengaruhi oleh perbedaan nilai, kultur, budaya, sejarah serta geografi masing-masing.

Dalam hubungan internasional, analogi tersebut dapat diperbandingkan dengan, sebagai contoh, fenomena organisasi internasional: neoliberal institusional memandang organisasi internasional sebagai sebuah keniscayaan sekaligus kebutuhan di era interdependensi, untuk memaksimalkan pencapaian

³⁴ Adian, 108

³⁵ Paradigma diartikan sebagai "kerangka konseptual untuk mengklasifikasi dan menerangkan objek-objek fisik alam; patokan untuk menspesifikasi metode yang tepat, teknik-teknik, dan instrumen dalam meneliti objek-objek dalam wilayah yang relevan; kesepakatan tentang tujuan-tujuan kognitif yang abash." Ibid, 86

³⁶ Contoh ini adalah kontekstualisasi ilustrasi Kuhn tentang perbedaan pembacaan antara Aristoteles dan Galileo terhadap sebuah batu berayun, Aristoteles mempersepsinya sebagai gerak lurus, sedangkan Galileo melihatnya sebagai gerak pendulum. Kuhn 1970 [1962], 121

kepentingan-kepentingan nasional para aktornya.³⁷ Sementara neorealis menganggap organisasi internasional sebagai bentuk baru anarki. Organisasi internasional dilihat sebagai pola baru distribusi power dalam hubungan antarnegara yang karakter dasarnya tetap *self-help*.³⁸ Perbedaan cara pandang ini salah satunya disebabkan karena kedua paradigma tersebut memiliki perbedaan keyakinan tentang karakter dasar manusia.

Ini artinya, fakta yang eksis secara independen akan tampil dengan warna dan rasa yang berbeda di depan dua paradigma yang berbeda, bukan karena fakta yang berubah bentuk, fakta tetaplah demikian sebagaimana penampilannya, tetapi karena dua paradigma itulah yang memaknakan dan membahasakan fakta tersebut secara tidak sama. Perbedaan cara melihat ini selanjutnya akan melahirkan perbedaan cara meneliti objek tersebut, baik dalam pendefinisian, penyusunan kerangka konseptual, pemilahan/klasifikasi data, dan seterusnya.

Jadi jelas, cara melihat dan pengolahan data-data adalah rangkaian yang sarat subjektivitas sehingga pengetahuan atau teori yang dihasilkan pun tidak pernah objektif. Terlebih, eksistensi paradigma itu sendiri menjadi bukti tidak pernah adanya pengetahuan yang objektif. Kemunculan paradigma-paradigma adalah buah dari kesepakatan dan ketidaksepakatan intersubjektif di antara para ilmuwan. Sebagaimana umumnya kesepakatan, ia selalu sarat nilai dan kepentingan. Konstruktivis anti-*law-like generalization*. Sepintas uraian mengenai penolakan konstruktivis terhadap doktrin 'bebas nilai' di atas akan mengesankan bahwa konstruktivis adalah penganut paham relativitas kebenaran (pengetahuan) seperti halnya para reflektivis-pospositivis radikal—satu paham yang dituduh sebagai tidak bermanfaat dan anti-kemajuan.³⁹ Argumentasi bahwa paradigma mempengaruhi cara seseorang/ilmuan memahami realitas tidak berarti bahwa setiap pemahaman itu benar dan tidak ada pemahaman yang keliru. Jika demikian maka dialog, penelitian dan perdebatan antarparadigma menjadi tidak ada artinya. Bahkan jika semua pemahaman itu benar maka kata 'benar' itu sendiri menjadi tidak bermakna, sebab eksistensi 'benar' tidak berdiri sendiri tetapi selalu bersanding dengan oposisi binernya 'salah'. Adanya pengetahuan yang disepakati sebagai 'benar'-lah yang telah mengantarkan umat manusia menuju keberadaannya seperti saat ini dengan segala kemajuan dan eksekusi negatif yang dihasilkannya. Jika tidak, barangkali umur peradaban manusia tidak akan sampai setua ini, atau mungkin dunia ini menjadi 'neraka', sebab setiap orang merasa benar dan atas dasar itu bebas melakukan apapun untuk memuaskan hasratnya. Kesepakatan akan satu kebenaran-lah yang mempersatukan mereka untuk menjalani hidup bersama dan beranak-pinak.

Signifikansi gagasan Kuhn tentang kebenaran paradigmatis, kebenaran/pengetahuan sesuai dengan anutan paradigma, adalah bahwa klaim kebenaran universal (Benar 'B-besar') tidak layak dilakukan, sebab hal itu akan menutup atau menghegemoni kemungkinan-kemungkinan kebenaran lain. Ini adalah tindakan arogan dan totaliter, sebab kebenaran itu adalah hasil interpretasi atas fenomena. Konstruktivis, secara ontologis, tetap mengakui eksistensi dunia di

³⁷ Keohane 1984

³⁸ Archer 1992, 86

³⁹ Adian, 90-91

luar pikiran ini.⁴⁰ Namun apa yang dilakukan manusia terhadap dunia fenomenal tersebut adalah mengkonstruksinya, dengan sarana bahasa, sehingga menghasilkan pemahaman tentangnya. Ketika sebuah pemahaman disampaikan kepada khalayak dan disepakati sebagai kebenaran, pemahaman tersebut tetap bersifat tentatif, intersubjektif dan kontekstual. Pemahaman tersebut tetaplah pemahaman, sebuah upaya deskripsi atas realitas di luar sana (*out there*), bukan representasi dari realitas tersebut. Realitas tidak muncul dengan sendirinya menjadi sebuah kebenaran, tetapi kita lah yang mengkonstruksi kebenaran tersebut dari realitas yang kita saksikan.

Yang perlu dan hanya dapat dilakukan oleh ilmuan, menurut konstruktivis, adalah membuat 'kebenaran kecil' (benar 'b-kecil').⁴¹ Seperti dijelaskan di atas, walaubagaimanapun klaim kebenaran adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dihindari dan memang diperlukan. Secara individual, klaim kebenaran menjadi pijakan untuk mengambil keputusan dan bertindak, sedangkan secara kolektif ia diperlukan sebagai norma sosial untuk menjalani hidup dan mencapai cita-cita bersama secara harmonis. Berbeda dengan kebenaran 'B-besar' yang ambisius untuk sebisa mungkin berlaku *timeless* dan *spaceless (law-like generalization)* yang sering menjadi hasrat para rasionalis-positivis, kebenaran 'b-kecil' kaum konstruktivis bersifat kontekstual, tentatif dan intersubjektif.

Kontekstual dalam arti bahwa kebenaran 'b-kecil' adalah pengetahuan yang digali dari dan hanya berlaku bagi sebuah fenomena dengan konteks tempat, waktu dan aktor tertentu. Satu fenomena satu teori; dua fenomena dua teori; bahkan satu fenomena bisa dua, tiga atau banyak teori. Konstruktivis tidak berhasrat mengumpulkan banyak fenomena untuk dianalisis guna merumuskan *grand theory*, atau membuat ramalan masa depan.⁴² Konstruktivis meyakini bahwa, jika ada banyak interpretasi tentang satu fenomena, pasti ada satu di antaranya yang terbaik, yang paling dekat dengan realitas sebenarnya, yang mampu menjelaskan dan memahami dengan lebih baik di antara lainnya. Namun demikian, klaim seperti ini harus diuraikan secara argumentatif dan dialogis, tanpa ada tendensi untuk merendahkan interpretasi-interpretasi lain apalagi beranggapan interpretasi sendiri sebagai paling benar dan yang lain salah, karena dari proses dialogis dan argumentatif inilah akan bermunculan interpretasi-interpretasi baru.⁴³ Kemudian, kebenaran 'b-kecil' bersifat tentatif berarti bahwa kebenaran tersebut tidak *timeless*, berlaku untuk selamanya. Bertumpu pada keyakinan bahwa kebenaran itu adalah konstruksi sosial—bukan korespondensi seperti dalam positivisme—konstruktivis berpandangan bahwa kebenaran itu berjalan. Cepat atau lambat apa yang saat ini disepakati sebagai penjelasan/pemahaman terbaik,

⁴⁰ Guzzini, 159

⁴¹ Price and Reus-Smith, 272; istilah "Benar 'B-besar'" dan "benar 'b-kecil'" di sisi mengikuti istilah "*B-Big' Truth*" dan "*t-small' truth*" oleh dua penulis ini.

⁴² Kecuali Alexander Wendt, seorang tokoh konstruktivis liberal. Dalam artikelnya "*Why a World State is Inevitable*", Wendt membuat ramalan besar bahwa sebuah negara global akan lahir dalam kurun antara 100-200 tahun yang akan datang. Ramalan ini merupakan pengembangan atas teorinya tentang tiga tahapan anarki internasional: Hobbesian, Lockean dan Kantian, yang diuraikan dalam *magnum opus*-nya *Social Theory of International Politics*. Wendt 2003.

⁴³ Kuhn, 77-91

bisa jadi akan tergantikan dengan penjelasan/pemahaman baru yang kemudian disepakati menjadi yang terbaik untuk zamannya, dan demikian seterusnya.

Keyakinan bahwa kebenaran adalah konstruksi sosial juga berarti, kebenaran adalah hasil sekaligus proses intersubjektif. Artinya, setiap pengetahuan yang ditemukan oleh seorang ilmuwan akan mendapat legitimasi sebagai pengetahuan yang benar, lebih baik atau paling baik, setelah melewati proses sosialisasi. Pertama-tama, fakta tidak menampilkan dirinya sendiri sebagai pengetahuan. Apa yang berhasil diketahui oleh seorang subjek peneliti tentang fakta tersebut tidak serta-merta menjadi pengetahuan, karena masih merupakan subjektivitas si peneliti. Subjektivitas tersebut harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada subjek lain baik sesama ilmuwan, komunitas ilmuwan atau masyarakat umum. Pada tahap inilah subjektivitas tersebut bertemu dan berdialog dengan subjektivitas-subjektivitas lain hingga akhirnya melahirkan pemahaman bersama (*shared understanding*). Jadi, sosial adalah pintu terakhir yang harus dilewati suatu interpretasi atas fakta menjadi pengetahuan.

Lebih jauh lagi konstruktivis meyakini bahwa, sebagai implikasi ontologis *verstehen* (interpretasi), apa yang disebut fakta juga merupakan hasil interpretasi sosial. Apa yang ingin diinterpretasikan oleh para ilmuwan tentang sebuah fakta sejatinya telah diinterpretasikan dalam kehidupan sosial.⁴⁴ Dengan kata lain, pemahaman seorang ilmuwan tentang fakta yang ingin diteliti adalah hasil proses intersubjektif dia dalam interaksi sosialnya. Ketika dia meneliti tentang perang, misalnya, artinya dia meneliti tentang suatu kejadian yang diinterpretasikan dan dinamakan oleh khalayak umum sebagai 'perang'. Bahwa dia mengamini interpretasi tersebut adalah karena dalam dirinya sudah terdapat stok pengetahuan tentang kriteria sebuah fenomena diidentifikasi sebagai perang. Stok pengetahuannya pun didapatkannya dari hasil pembelajaran sosial di keluarga, sekolah, kampus dan lingkungan masyarakatnya. Maka upaya interpretasi seorang ilmuwan tentang sebuah fakta sosial, fakta natural sekalipun, untuk menghasilkan pengetahuan tidak lain adalah proses pengolahan interpretasi-intrepretasi yang telah tersedia dalam dunia sosial.

Kesimpulan

Sampai di sini cukup jelas bahwa konstruktivisme itu bukan teori, tetapi sebuah aliran dalam filsafat ilmu. Ia masuk ke dalam HI menawarkan gagasan-gagasan alternatif tentang apa isi dunia internasional (ontologi) dan bagaimana cara mengkajinya (epistemologi), sehingga menjadi rival terbaru bagi rasionalisme-positivisme, aliran filosofis yang dianut oleh neorealis dan neoliberal. Namun perkembangan pada 1990an menunjukkan upaya para pengusung konstruktivisme di HI untuk merangkai teori-teori substantif. Inilah selanjutnya yang melibatkan konstruktivisme dalam perdebatan teoretis dengan neorealisme dan neoliberalisme. Hingga akhirnya kemiripan-kemiripan teoretis yang ada dilihat oleh Fred Chernoff sebagai konfusi terselubung antara konstruktivisme dengan para kompetitornya seperti neorealisme atau neoliberalisme.⁴⁵ Alexander Wendt, misalnya, adalah salah seorang tokoh besar konstruktivis namun memiliki

⁴⁴ Adler, 326

⁴⁵ Chernoff, 152-153

kemiripan orientasi teoretis dengan neoliberal institusional. Gagasannya tentang sebuah *world state*⁴⁶ adalah puncak apresiasi Wendt terhadap fenomena organisasi internasional. Chernoff menyebut Wendt sebagai konstruktivis bertendensi liberal (*liberal-leaning constructivist*) karena teori-teorinya yang memiliki kecenderungan yang mirip dengan teori-teori neoliberal. Sementara tokoh postrukturalis seperti Jim George melabeli konstruktivisme sebagai pengkhianat tradisi kaum anti rasionalisme-positivisme karena orientasi-orientasi 'saintifik'-nya.⁴⁷

Lalu, apa lagi setelah konstruktivisme? Pertanyaan ini muncul dari asumsi konstruktivis juga bahwa kebenaran itu berjalan karena ia bersifat paradigmatik. Perkembangan isu dan fenomena akan terus melahirkan anomali-anomali, dan anomali-anomali ini melahirkan kritik-kritik dan perdebatan baru yang kemudian melahirkan kesepakatan dan ketidaksepakatan baru, dan berujung pada munculnya paradigma baru. Konstruktivisme adalah capaian mutakhir dalam HI. Tetapi kini sudah mulai bermunculan kritik terhadap paradigma tersebut, dan kritik-kritik itu tidak mustahil akan merupakan embrio paradigma pasca-konstruktivisme.

Kritik-kritik terbaru ternyata tidak diarahkan seorang kepada konstruktivisme, tetapi juga dua pendahulunya rasionalisme-positivisme dan reflektivisme-pospositivisme. Oleh Patomäki dan Wight, misalnya, rasionalisme-pospositivisme dan reflektivisme-pospositivisme dikelompokkan sebagai kaum anti-realisme vis-à-vis realisme (*critical/scientific realism*), sebuah aliran filsafat yang dikembangkan oleh Roy Bashkar dalam karya *masterpiece*-nya *A Realist Theory of Science*. Konstruktivisme dianggap bermasalah karena berusaha menengahi dua kubu yang bermasalah itu.⁴⁸ Apakah *critical realism* dan bagaimana prospeknya dalam perkembangan HI selanjutnya? Dibutuhkan pembahasan tersendiri untuk menjawab pertanyaan ini.⁴⁹ Yang jelas, seperti halnya rasionalisme-positivisme dan reflektivisme-pospositivisme, konstruktivisme adalah paradigma. Hingga detik ini, ia adalah inovasi mutakhir para ilmuwan HI, tetapi bukan yang terakhir.

Daftar Pustaka

- Adian, Doni Gahral. (2002). *Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan: Dari David Hume sampai Thomas Khun*. Jakarta: Penerbit TERAJU.
- Adler, Imanuel. (1997). Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics. *European Journal of International Relations*, Vol.3(3), 319-363.
- Archer, Clive. (1992). *International Organizations* (second edition). London: Routledge
- Ashley, Richard K. (1989). Living on Border Lines: Man, Poststructuralism and War, dalam James Der Derian & Michael J. Shapiro. *International/Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics*. New York: Lexington Books.

⁴⁶ Lihat catatan no.45

⁴⁷ George, 15

⁴⁸ Patomäki and Wight 2000

⁴⁹ Lihat misalnya Wendt 1999; Patomäki and Wight 2000; Chernoff 2002; Joseph 2007; Wight 2007

- Bilad, Cecep Zakarias El. (2011). *Rivalitas antara Iran dan Arab Saudi dalam Perspektif Konstruktivisme Alexander Wendt*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Chernoff, Fred. (2002). Scientific Realism as a Meta-Theory of International Politics. *International Studies Quarterly*, Vol.(46), 189-207.
- Copeland, Dale C. (2006). The Constructivist Challenge to Structural Realism: A Review Essay, dalam Stefano Guzzini & Anna Leander. (2006). *Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and his critics*. New York: Routledge.
- Desh, Michael C. (Summer, 1998). Culture Clash: Assessing the Importance of Ideas in Security Studies. *International Security*, Vol.23 (1), hal.141-170.
- Finnemore, Martha and Kathryn Sikkink. (Autumn, 1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, Vol.52(4), 887–917.
- Fred Chernoff. (2007). *Theory and Metatheory in International Relations: Concepts and Contending Accounts*. New York: Palgrave Macmillan.
- George, Jim. (1994). *Discourses of Global Politics: A Critical (Re)Introduction to International Relations*. Boulder: Lynne Rienner.
- Guzzini, Stefano. (2000). A Reconstruction of Constructivism in International Relations. *European Journal of International Relations*, Vol.6(2), 147-182.
- Hopf, Ted. (Summer 1998). The Promise of Constructivism in International Relations Theory. *International Security*, Vol.23(1), hal.171-200.
- John G. Ruggie. (Winter, 1993) 'Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations. *International Organization*, Vol.47(1), 139–174.
- Jonathan Joseph. (2007). Philosophy in International Relations: A Scientific Realist Approach. *Millenium: Journal of International Studies*, Vol.35 (2), 345-359.
- Katzenstein, Peter. (1996). *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Columbia University Press.
- _____. (1997). *Tamed Power: Germany in Europe*. Ithaca: Cornell University Press.
- _____. (2008). *Rethinking Japanese Security: Internal and External Dimensions*. New York: Routledge.
- Keohane, Robert O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Kuhn, Thomas. (1970 [1962]). *The Structure of Scientific Revolutions (Second Edition)*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Lapid, Yosef. (1989). The Third Debate: on the Prospect of International Theory in a Post-positivist Era. *International Studies Quarterly*, Vol.33 (3), 235-54.
- Marschall, Christin. (2003). *Iran's Persian Gulf Policy from Khomeini to Khatami*. London: Routledge.
- Mearsheimer, John J. (Summer, 1990). Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War. *International Security*, Vol.15 (1), 5-56.
- Onuf, Nicholas Greenwood. (1989). *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations*. Columbia: University of South Carolina Press.

- Patomaki, Heikki and Collin Wight. (2000). After Postpositivism? The Promises of Critical Realism. *International Studies Quarterly*, Vol.44 (2), 213-237.
- Price, Richard and Christian Reus-Smit. (1998). Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism. *European Journal of International Relations*., Vol.4 (3), 259-94.
- Rengger, R.N. (2000). *International Relations, Political Theory and the Problem of Order: Beyond International Relations Theory?* New York: Routledge.
- Ruggie, John G. (1983) 'Continuity and Transformation in the World Polity: Toward a Neorealist Synthesis. *World Politics*, Vol.(35), 261–285.
- Smith, Steve, Ken Booth, Marysia Zalewski (Ed.). (1996). *International Theory: Positivism and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press.
- _____. (Oktober, 2000). The Discipline of International Relations: still an American social science? *British Journal of Politics and International Relations*, Vol.2 (3), 374-402.
- Wæver, Ole. (1996). The Rise and Fall of the Inter-Paradigm Debate, dalam Steve Smith, Ken Booth, Marysia Zalewski (Ed.). *International Theory: Positivism and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Waltz, Kenneth N. (1979). *Theory of International Politics*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Weber, Cynthia. (1995) *Simulating Sovereignty: Intervention, the State and Symbolic Exchange*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wendt, Alexander. (Spring, 1992). Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*, Vol.46 (2), 391-425.
- _____. (Summer, 1995). Constructing International Politics. *International Security*, Vol.20, No.1, 71-81.
- _____. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- _____. (2003). *Why a World State is Inevitable*. *European Journal of International Relations*, Vol.9 (4), 491-542.
- Wight, Collin. (2007). A Manifesto of Scientific Realism in IR: Assuming the Can-Opener Won't Work! *Millenium: Journal of International Studies*, Vol.35 (2), 379-398.